

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoellah, Prayatmanto, *Revitalisasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Adi, Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, LPP dan UNS PRESS, Surakarta, 2007.
- Asshiddiqie (2), Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Basah, Syachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Friedrich, Hayek, *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago. USA, 1960.
- Hanintijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua, Jakarta, Banyumedia Publisng, 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan upaya administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan Pertama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- M. Hadjon dkk, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1994.

M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2005.

Poewadarmita, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.

Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cet 2, Alumni, Bandung, 1978.

Setya Pratiwi, Christina Yulita Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati, Cekli, *Penjelasan Umum AUPB Hukum Administrasi Negara*, Judicial Sector Support Program (JSSP), Jakarta, 2016.

Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Surbakti, Ramlan, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Jakarta, Kemitraan, 2008.

Syahrani, Riduan, *Kata – Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, P.T. Alumni, 2009.

Soegijatno Tjakranegara, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2008.

Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed. Revisi, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2008.

Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Surabaya, Airlangga University Press, 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1442);

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

### **Jurnal**

Pradini Citra Amalia, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum*, Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017.

Denny Indrayana· Dan Zainal Arifin Mochtar, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Tahun 2013.